

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmad Setiawan. 2019. *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria)*. LaksBang Justitia. Yogyakarta.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Maria S. Sumardjono. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press. Surabaya.
- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Panggabean. 2002. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung.

Suriansyah Murhaini. 2018. *Hukum Pertanahan: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah*. LaksBang Justitia. Surabaya.

Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Prenadamedia Group. Jakarta.

JURNAL:

Butet Wulan Trifina. Sri Endang Rayung. Sri Ayu Astuti. "Pemahaman Pentingnya Kesadaran Hukum Akan manfaat Sertifikasi Tanah di Masyarakat Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara". Jurnal Pengabdian Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Vol 1. Nomor 1 Juni 2019. hlm. 11-18.

Christina Randaluyuk. Meinarni Asnawi dan Anthonius H. Citra Wijaya. "Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang)". Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih. Vol. 2. Nomor 2 November 2019. hlm. 66-78.

Dewi Rachmawati. "Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah". Jurnal Ilmiah Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Vol. 6. Nomor 6 Juni 2021. hlm. 2700-2715.

Donna Okthalia Setiabudhi. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance". The Studies of Social Science. Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 1, Nomor 1 2019. hlm. 7-21.

Era Nandya Febriana. Jayus. Rosita Indrayati. "Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah". e-journal Lentera Hukum. Fakultas Hukum Unej. Vol. 4. Nomor 2 Agustus 2017. hlm. 133-149.

Fingli A. Wowor. "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah". Lex Privatum. Fakultas Hukum Unsrat. Vol.II, Nomor 2 April 2014, hlm. 95-104.

- Iqbal Dwi Januar, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah", Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 25, Nomor 10 Mei 2019, hlm. 1-5.
- Kiki Rizki (et.al). "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum". Jurnal Aktualita, Alumni Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Unisba. Vol. 3, Nomor 1 2020 hlm. 688-704.
- Muh. Iqbal, Abrar Saleng. Sri Susyanti Nur. "Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia". Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. 4. Nomor 2 April 2020. hlm 70-94.
- Putu Diva Sukmawati. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial Undiksha. 2017. Vol. 2. Nomor 2 April 2022. hlm. 89-102.
- Rinaldi Sarlim & Fitrah Sri Rahayu. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan". Celebes Equilibrium Jurnal. LL-DIKTI IX. Vol. 1. Nomor 1 Juli 2019. hlm. 18-25.
- Rukiah Rahman Ali (et.al). "Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo". Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. 2017. hlm. 72-81.
- Sri Susyanti Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah". Hasanuddin Law Review. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. 1. Nomor 1 April 2015. hlm 88-100.
- Yose Andreas Pasaribu. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah yang Bersertifikat Ganda". Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum UHN. Desember 2021. hlm. 1-35.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KARYA ILMIAH:

Hardiyanti. 2020. "*Analisis Penyelesaian Konflik Pengelolaan Aset Tanah Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar*". TESIS. Magister Pemerintahan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.

Kurniawati. 2021. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muh. Iqbal Arfadli. 2014. "*Tugas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Putri Cut Keumalahayati. 2017. "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

MEDIA:

Aly. "KPK Saran Bereskan 7 Aset di Makassar". *Harian Tribun Timur*. 14 November 2021. hlm. 2.

BPH Humas dan Herwin. 2016. *Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf*. Makassar.

BPS, Sensus Penduduk Tahun 2020,
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses tanggal 17 Februari 2022.

<https://gosulsel.com/2021/04/08/menang-gugatan-dari-pemprov-yoss-minta-hak-pengelolaan-stadion-mattoanging/> , diakses tanggal 8 Juni 2022.